



PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2017



Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016**



SAMBUTAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat menyelesaikan publikasi “ Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016” ini. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah maka setiap daerah dituntut untuk dapat menyajikan indikator-indikator pembangunan daerahnya masing-masing. Salah satu indikator yang sangat dibutuhkan dan mendesak untuk disajikan adalah Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Kepada aparat BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dan BAPPEDA Kab. Tanjung Jabung Timur kami ucapkan terimakasih dengan kerja kerasnya sehingga terwujud publikasi ini. Mudah-mudahan kerjasama yang baik bisa lebih ditingkatkan.

Akhirnya, kami berharap kiranya publikasi ini dapat bermanfaat .

Muara Sabak, Desember 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO, SE



SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Publikasi “Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016” ini diharapkan dapat menjadi penambah kelengkapan informasi statistik yang telah ada sebelumnya. Publikasi ini berisi berbagai jenis data statistik untuk mengetahui kemiskinan dan tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama di bidang kemiskinan dan infrastruktur, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan lebih merata.

Akhirnya, saya mengajak semua pihak untuk bisa memanfaatkan publikasi ini dengan sebaik-baiknya.

Muara Sabak, Desember 2017
BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pt. Kepala,

HERLI, S.Pt



KATA PENGANTAR

Seiring pelaksanaan otonomi daerah maka setiap daerah dituntut untuk dapat menyajikan indikator-indikator pembangunan daerahnya masing-masing. Salah satu indikator yang sangat dibutuhkan dan mendesak untuk disajikan adalah kemiskinan dan indeks kemahalan konstruksi.

Untuk keperluan melengkapi kebutuhan data dimaksud, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan publikasi “Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016”.

Kami menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan adanya masukan yang positif demi perbaikan publikasi ini ke depannya.

Semoga publikasi ini bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Muara Sabak, Desember 2017

BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kepala,

IRNA ARIANTI, S.Si



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA SAMBUTAN BUPATI.....	i
KATA SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sumber Data	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. METODOLOGI	9
2.1. Kemiskinan	9
2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).....	19
BAB III. TINGKAT KEMISKINAN	25
3.1. Jumlah Penduduk	25
3.2 Tingkat Kemiskinan	27
3.3 Perkembangan Kemiskinan	27
3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	29
BAB IV. PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTADI PROVINSI JAMBI.....	31
4.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan	31
4.2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	32
4.3 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	34



BAB V. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI IKK	35
5.1 Perbandingan IKK	35
5.2 Perkembangan IKK	36
BAB VI. KESIMPULAN	39



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 3.1. Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016	26
Tabel 5.1. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016	35



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 3.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2012-2016	28
Gambar 4.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2012-2016	32
Gambar 4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016	33
Gambar 4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016	34
Gambar 5.1 Perkembangan Peringkat IKK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2012-2016	37

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB 1 PENDAHULUAN



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak runtuhnya orde baru dan dimulainya era reformasi, maka dimulai pula era otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dirasakan akan efektif untuk meminimalisir kebijakan sentralistik yang dirasakan pada era orde baru sangat tidak berkeadilan. Dimana ketika kebijakan sentralistik diterapkan, timbul ketimpangan pembangunan yang terjadi antara daerah jawa dan luar jawa.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, kepada pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan yang lain. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan. Meskipun tidak dapat dipisahkan, kesiapan keuangan daerah dapat dipilah dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Kesiapan dari sisi pengeluaran menekankan pada kewajaran pengeluaran daerah, khususnya unit-unit kerja di daerah baik kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Kemandirian sisi penerimaan daerah menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara tepat potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada azas keadilan.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan yang terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan SDA, DAU dan Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan lainnya.



Transfer dana dari pusat ke daerah diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data dasar yang digunakan dalam menentukan jumlah Dana Alokasi Umum suatu Daerah (DAU) antara lain :

- Jumlah Penduduk
- Jumlah Penduduk Usia Produktif
- Jumlah Penduduk Miskin
- Kepadatan Penduduk
- Luas Wilayah
- PAD tahun sebelumnya
- PDRB
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah maka setiap daerah dituntut dapat menyajikan indikator-indikator pembangunan didaerahnya yang salah satu indikator yang sangat dibutuhkan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan jumlah penduduk miskin.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan pencerminan dari perkembangan harga dan tingkat kemahalan konstruksi periode tertentu terhadap tahun dasar suatu Kabupaten/Kota. IKK juga dapat digunakan sebagai standarisasi harga barang dan jasa, terutama yang digunakan untuk kegiatan di bidang konstruksi, sehingga dapat dinilai kewajaran dari anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.

IKK merupakan salah satu variabel yang masuk dalam kelompok kebutuhan fiskal, dan menjadi faktor penambah yang mempunyai bobot yang cukup besar dalam penghitungan DAU. Di satu sisi tingginya angka IKK di suatu kabupaten/kota dalam penentuan besarnya dana DAU yang akan



diterima. Namun, di sisi lain tingginya angka IKK di suatu kabupaten/kota mencerminkan bahwa daerah tersebut relatif lebih sulit dijangkau. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang sulit, atau bisa juga disebabkan oleh minimnya infrastruktur serta fasilitas transportasi yang kurang memadai, yang mengakibatkan harga barang-barang termasuk barang konstruksi di daerah tersebut relatif lebih mahal.

IKK dihitung menurut kelompok jenis bangunan (3 kelompok) yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dalam penghitungannya digunakan 3 komponen penunjang, yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan harga jenis bahan bangunan/sewa alat dan upah jasa.

Dekade terakhir ini titik sentral pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena mereka tidak saja selalu diposisikan dalam objek tetapi harus menjadi subjek. Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas dari permasalahan/kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang ada yaitu penduduk miskin.

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatas dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Standar minimal kebutuhan hidup akan berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya., tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi yang ada dan distribusi, serta letak geografis.



Dari pengalaman survei yang dilakukan, sangat sulit memperoleh data tingkat pendapatan seseorang (Hananto Sigit, 1980). Pendekatan yang lebih memungkinkan adalah melalui sudut pengeluaran. Dengan demikian total nilai pengeluaran makanan dan non makanan yang dijadikan standar minimal kebutuhan hidup merupakan Batas Biaya Minimal yang dibutuhkan untuk hidup dalam kategori tidak miskin. Batas inilah yang disebut Garis Kemiskinan.

Batas minimal kebutuhan untuk makanan diukur dalam tingkat kecukupan kalori yaitu sebesar 2100 kalori setiap orang setiap hari. Mengacu kepada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan minimum energinya sebesar 2100 kalori perhari. Kebutuhan energi ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi berbagai jenis komoditi makanan, seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging dan sebagainya.

Pada dasarnya, metode perhitungan penduduk miskin yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali hingga saat ini, menggunakan pendekatan yang sama yaitu *basic needs approach*. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu, BPS senantiasa selalu melakukan penyempurnaan terhadap metodologi perhitungan penduduk miskin, terutama pada penentuan paket komoditi dasar makanan dan non makanan. Paket komoditi dasar ini dipakai untuk menentukan garis kemiskinan, yaitu suatu garis yang dipakai sebagai patokan bagi seseorang apakah dikategorikan sebagai penduduk miskin atau tidak miskin.

Penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS pada awalnya dimaksudkan untuk mendapatkan angka tingkat kemiskinan nasional. Namun



demikian besarnya perhatian pemerintah (pusat dan daerah) pada upaya penanggulangan kemiskinan, maka permintaan data kemiskinan di setiap propinsi dan bahkan pada tingkat kabupaten/kotamadya juga semakin mendesak.

Seperti diketahui, bahwa informasi mengenai penduduk miskin yang diolah berdasarkan data modul konsumsi Susenas hanya bersifat makro. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan program pengentasan kemiskinan. Akibatnya, banyak program pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Secara operasional, pemerintah tidak mempunyai informasi yang bersifat makro tentang akar permasalahan apa yang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan, sehingga sulit bagi pemerintah atau badan dunia atau swasta menentukan siapa yang seharusnya berhak untuk diberi dana bantuan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, disamping informasi makro tentang jumlah dan persentase penduduk miskin seperti yang dilakukan BPS selama ini, maka dirasakan betapa pentingnya informasi tentang kemiskinan yang bersifat mikro serta operasional di lapangan dimungkinkan menggunakan data BKKBN sebagai rujukan lain dalam operasionalnya di lapangan.

Dalam publikasi ini disajikan cara penghitungan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain angka kemiskinan tersebut indikator lain yang sangat diperlukan untuk penghitungan DAU yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK adalah indeks yang menggambarkan selain perkembangan harga juga menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi periode tertentu terhadap tahun dasar suatu kabupaten/kota.



1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin adalah Susenas Modul Konsumsian SUSENAS KOR. Susenas KOR dan Modul Konsumsi dilakukan tiap tahun.

Data hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 1995 yang digunakan dalam menghitung batas kecukupan non makanan 1996, juga digunakan dalam penentuan batas kecukupan non makanan 1999. SPKKD memberikan informasi mengenai jenis – jenis barang dan jasa yang dikonsumsi secara sangat rinci (lebih rinci dari SUSENAS) sehingga dapat diketahui untuk komoditi pakaian, misalnya pakaian seperti apa yang menjadi kebutuhan pokok (apakah termasuk pakaian dalam anak – anak, topi dan sebagainya). Dengan demikian SPKKD memberikan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Dengan proporsi tersebut, selanjutnya dari data SUSENAS dapat diperkirakan besarnya nilai kebutuhan pokok.

IKK dihitung di 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat. Proses pengumpulan data harga tersebut dilakukan melalui survei harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi (HPB-K) yang dilakukan secara triwulanan di seluruh kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan dalam survey HPB-K tersebut terdiri dari harga 145 kualitas barang yang berasal dari 60 jenis barang dan harga sewa 4 macam alat berat.

Jenis barang/bahan bangunan yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalian dan barang-barang hasil industri.



Sumber data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah Diagram Timbang, terdiri dari Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan dan Diagram Timbang Umum.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penulisan publikasi IKK Kab. Tanjung Jabung Timur, diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Membandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.
3. Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan membandingkannya dengan Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

- BAB I Meliputi latar belakang dari publikasi ini
- BAB II Memaparkan mengenai metodologi perhitungan penduduk miskin (jumlah dan persentase), Garis Kemiskinan serta penghitungan IKK
- BAB III Menguraikan bagaimana jumlah penduduk miskin dan besarnya IKK tahun 2016 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- BAB IV Menguraikan mengenai perbandingan tingkat kemiskinan Kab/Kota di Propinsi Jambi
- BAB V Memaparkan perbandingan IKK antar kabupaten di Jambi, serta perkembangan IKK

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB II METODOLOGI



BAB II METODOLOGI

2.1 Kemiskinan

Metode yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin adalah metode *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu dihitung garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya).

Penghitungan garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin bisa dilakukan oleh BPS setiap tahun. Dari hasil penghitungan diperoleh angka kemiskinan tingkat nasional dan propinsi yang dibedakan antara rural dan urban. Penghitungan penduduk miskin juga dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota apabila sampelnya memadai.

Secara ringkas tahapan perhitungan penduduk miskin dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Penduduk miskin tingkat nasional dan yang dirinci menurut propinsi dihitung terlebih dahulu menggunakan data Susenas Modul Konsumsi.
2. Penghitungan penduduk miskin propinsi dapat dilakukan oleh BPS



Propinsi secara independen, menggunakan data Susenas Modul dengan pedoman seperti yang akan diuraikan selanjutnya pada bagian ini.

3. Berpedoman pada angka propinsi tersebut maka dapat dilakukan penghitungan penduduk miskin tingkat kabupaten/kota.

2.1.1 Menentukan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Nasional dan Propinsi dari Data Susenas Modul

Seperti dijelaskan di atas, Garis Kemiskinan Makanan atau batas kecukupan makanan di hitung berdasarkan pada kebutuhan minimum makanan yang dikonsumsi untuk dapat hidup sehat, yaitu kebutuhan makanan yang akan menghasilkan energi 2100 kalori per kapita per hari. Pendekatan yang digunakan dalam menghitung nilai rupiah yang setara 2100 kalori adalah pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini telah digunakan sejak tahun 1993.

Dalam pendekatan kebutuhan dasar, pertama kali dipilih sejumlah paket komoditi kebutuhan dasar penduduk. Suatu komoditi akan menjadi bagian dari paket kebutuhan dasar apabila komoditi tersebut banyak dikonsumsi oleh sekelompok penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan atau yang tersebut kelompok referensi. Seperti telah dijelaskan, dalam perhitungan kemiskinan Februari 1999 telah digunakan standar baru (1998) yang telah disempurnakan. Dengan menggunakan standar ini, yang diperhitungkan sebagai kelompok referensi adalah kelompok penduduk desil ke 2 dan 3 (D2 dan D3 atau persentil 11-30) yang didasarkan atas



pengeluaran riil. Penggunaan kelompok penduduk D2 dan D3 sebagai kelompok referensi didasarkan atas asumsi bahwa *hardcore* angka kemiskinan berkisar sekitar 10 persen.

Paket komoditi dasar makanan yang dipakai untuk menentukan garis kemiskinan 1999 ditetapkan pada data Susenas 1999. Tujuan utama dari pemilihan komoditi makanan tersebut adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang merupakan kebutuhan dasar penduduk, yang selanjutnya akan dijadikan standar sebagai kebutuhan minimum makanan. Pemilihan kebutuhan dasar dilakukan dengan asumsi bahwa kelompok penduduk kelas bawah akan selalu mengutamakan kebutuhan dasar terlebih dahulu, maka komoditi yang banyak dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk kelas bawah dianggap merupakan kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, kebutuhan dasar adalah komoditi yang dikonsumsi mayoritas penduduk kelas bawah. Selain pertimbangan tersebut, pemilihan komoditi dilakukan dengan juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya. Seperti banyaknya komoditi dalam masing-masing kelompok jenis makanan yang dipertimbangkan. Jadi untuk kelompok jenis makanan yang terdiri dari banyak jenis makanan, maka jumlah komoditi yang dipilih untuk mewakili kelompok tersebut juga lebih banyak. Dari pertimbangan kewajaran, jika jelas merupakan kebutuhan pokok, seperti beras dan garam maka komoditi tersebut tetap terpilih.

Ketentuan pemilihan tersebut tidak dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang membedakan antara perkotaan dan



perdesaan adalah nilai pengeluarannya, yang dapat menggambarkan perbedaan kuantitas harga. Jadi secara tidak langsung, perbedaan ini menggambarkan perbedaan kualitas barang yang umumnya dikonsumsi oleh penduduk perkotaan dan perdesaan. Dengan cara tersebut maka terpilih antara 2-5 jenis komoditi di setiap kelompok komoditi makanan, dan secara total terpilih sekitar 52 komoditi makanan yang dijadikan sebagai paket komoditi dasar.

Jumlah komoditi dasar terpilih sama dengan paket tahun 1993 dan 1996. Yang berbeda adalah pada jenis komoditi dan nilai pengeluarannya. Perubahan jenis komoditi dasar terjadi karena adanya perubahan pola konsumsi penduduk. Jenis komoditi yang ada pada paket 1996 namun tidak ada pada paket 1999 adalah Sagu, Kangkung, Rambutan, serta beras lokal/kualitas unggul dan beras impor yang digabung menjadi satu komoditi, yaitu beras. Sementara jenis komoditi yang tidak ada pada paket 1996 namun terpilih pada paket 1999 adalah daging ayam ras, tepung galek, buncis, nangka muda, dan mangga.

Kandungan kalori ke-52 komoditi dasar yang riil dikonsumsi penduduk pada kelompok referensi nilainya tidak mencapai 2100 kalori, maka perlu dilakukan *mark-up*, yaitu dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya diperkirakan batas kecukupan makanan dengan formula sebagai berikut:



52

$$V = \sum_{i=1}^{52} v_i = v_1 + v_2 + \dots + v_{52}$$

$$K = \sum_{i=1}^{52} K_i = K_1 + \dots + K_{52}$$

$I=1$

$$HK = \frac{V}{K}$$

Dimana :

I = Jenis komoditi yang masuk dalam paket komoditi dasar (1,2,...,52)

V = Nilai pengeluaran dari ke-52 komoditi

K = Jumlah kalori dari ke-52 komoditi

HK = Harga rata-rata kalori ke 52 komoditi

Untuk memperoleh nilai pengeluaran minimum makanan yang menghasilkan energi 2100 kalori maka :

$$V' = HK \times 2100$$

$$F = V'$$

F = Pengeluaran minimum makanan (batas kecukupan makanan).

F adalah batas kecukupan makanan atau garis kemiskinan makanan, yang berdasarkan data Susenas Februari 1999 modul konsumsi yaitu yang menghasilkan 2100 kalori, pada tingkat nasional.

Seperti halnya pada penentuan garis kemiskinan makanan, di dalam menentukan garis kemiskinan non makanan pun digunakan pendekatan kebutuhan dasar di mana terlebih dahulu di tentukan jenis-jenis komoditi dasar non makanan. Penentuan paket komoditi dasar non makanan 1999



didasarkan atas hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 1995 (SPKKD 95) yang mencakup sekitar 5000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil survei ini telah digunakan pula untuk mengidentifikasi komoditi kebutuhan dasar non makanan tahun 1999 dan 2013 yang digunakan dalam menghitung garis kemiskinan non makanan 1999 dan 2013.

Mengingat pentingnya mengukur tingkat kemiskinan secara realistis, maka cakupan komoditi non makanan yang ada dalam standar 1996 diperluas. Revisi yang dilakukan untuk menentukan paket komoditi dasar pada standar tahun 1999 dan 2013 mencakup beberapa komoditi tambahan kedalam paket dasar, tetapi utamanya adalah memperluas cakupan beberapa komoditi non makanan dibidang yang dicakup pada standar 1996. Sebagai contoh, kalau dalam paket 1999 dan 2013 biaya pendidikan hanya mencakup biaya sampai dengan SD, maka dalam standar 1996, biaya pendidikan sampai dengan SLTP. Berbagai komoditi non makanan yang lainnya juga diperluas cakupannya sehingga lebih mampu mencerminkan kebutuhan dasar non makanan yang lebih realistis yang memang sudah berkembang. Penggunaan standar baru ini dinilai lebih realistis dan mampu mencerminkan dampak krisis secara lebih sensitif dibanding standar 1996 yang digunakan sebelumnya .

Salah satu ketentuan yang digunakan dalam menentukan paket komoditi kebutuhan dasar 1999 dan 2013 ini adalah frekuensi penduduk yang mengkonsumsi suatu komoditi minimal 20 persen, sedangkan pada standar 1996 batas minimalnya 30 persen. Dengan adanya perbedaan standar tersebut maka beberapa komoditi dasar 1998. Komoditi-komoditi itu antara lain : di perkotaan adalah perkiraan rumah milik sendiri, air dibeli, baterai, dokter praktek, uang sekolah SLTP, buku pelajaran dan alat tulis



SLTP, ongkos transportasi becak/andong/ojek/penyeberang sungai, foto, serta perkakas seperti gunting, pisau, gergaji; di pedesaan antara lain rumah milik sendiri, semprong/sumbu, ongkos puskesmas dan dokter praktek, uang sekolah SLTP, buku pelajaran dan alat-alat tulis SLTP, ongkos andong/becak/ojek, foto.

Dengan adanya perubahan tersebut maka jenis komoditi yang masuk sebagai paket komoditi dasar menjadi 51 jenis di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan atau jika diagregasikan menurut sub- kelompoknya adalah 27 sub-kelompok pengeluaran di perkotaan dan 25 sub-kelompok pengeluaran di pedesaan.

Dari Susenas tidak dapat diketahui masing-masing pengeluaran ke-51 dan ke-47 jenis komoditi tersebut, yang diketahui hanyalah ke-27 dan ke-25 sub-kelompok pengeluarannya. Oleh karena ke-51 dan ke-47 jenis komoditi tersebut adalah merupakan bagian dari ke-27 dan ke-25 sub-kelompok, maka untuk menghitung nilai minimum non makanan harus diketahui rasio masing-masing sub-kelompok pengeluaran yang merupakan rasio pengeluaran jenis komoditi (51 dan 47 jenis) terhadap sub-kelompoknya. Rasio tersebut mengindikasikan persentase pengeluaran kebutuhan dasar terhadap sub-kelompoknya. Sebagai contoh, rasio pengeluaran barang kecantikan sebesar 88,85 persen, ini artinya bahwa sebanyak 88,85 persen dari pengeluaran sub-kelompok barang kecantikan merupakan kebutuhan dasar bagi kelompok referensi (*Lihat Seri Publikasi Susenas Mini 1999, Buku I, Pengukuran Tingkat kemiskinan Di Indonesia 1976-1999: Metode BPS*)

Dengan bertambah luasnya cakupan standar 1998 dibanding standar 1996 untuk masing-masing komoditi, maka rasio dalam sub-kelompok juga



berubah. Setelah diketahui rasio sub-kelompoknya maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai dari paket ini merupakan kebutuhan minimum non makanan atau batas kecukupan non makanan. Nilai ini merupakan perkalian dari rasio pengeluaran sub-kelompok dengan rata-rata pengeluaran sub-kelompok yang sama pada SUSENAS modul konsumsi. Nilai batas kecukupan non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF = \sum_{i=1} r_i \times V_i$$

Dimana :

- NF** : Pengeluaran minimum non makanan propinsi p
- V_i** : Nilai pengeluaran komoditi non makanan propinsi p (dari susenas modul konsumsi)
- r_i** : Rasio pengeluaran barang non makanan terhadap sub kelompok pengeluaran propinsi(dari SPKKD 95).
- I** : Jenis barang non makanan terpilih di propinsi.

NF adalah pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan. Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh nilai batas kecukupan minimum non makanan untuk tingkat nasional sebesar Rp 25.449,- untuk perkotaan dan Rp. 17.101,- untuk perdesaan.

Hasil penjumlahan F dan NF merupakan batas pengeluaran minimum untuk memnuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Batas ini dinamakan " Garis Kemiskinan " yang akan digunakan sebagai patokan penghitungan penduduk miskin

$$Z = F + NF$$



Cara penghitungan Garis Kemiskinan Nasional, seperti diuraikan diatas, berlaku juga untuk mendapatkan penghitungan Garis Kemiskinan Propinsi (Z_p) dan juga untuk penghitungan Garis Kemiskinan Kabupaten (Z_k), jika data modul tingkat Kabupaten/kodya tersedia dan representative.

2.1.2 Menentukan Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah dan persentase penduduk miskin propinsi yang dihitung menggunakan SUSENAS modul telah kita bicarakan pada bagian terdahulu. Karena sampel yang memadai untuk penghitungan penduduk miskin di setiap kabupaten/kota hanya tersedia dari Susenas KOR maka perhitungan perlu dilakukan menggunakan data Susenas KOR.

Secara garis besar penghitungan jumlah penduduk miskin dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

- Tentukan GK propinsi dari kor (Z_{ko}) dengan berpatokan pada persentase penduduk miskin propinsi dari modul.
- Z_{ko} diperoleh dengan memotong nilai pengeluaran per kapita per bulan pada persentase penduduk miskin propinsi modul, setelah data mentah diurutkan dari kecil ke besar berdasar pengeluaran perkapitanya.
- GK kabupaten/kota (Z_{ko})dihitung dengan :

$$= Y_{kx} * Z_{po}$$
$$Y_{px}$$

Y_{kx} : rata-rata pengeluaran perkapita kab/kota yang berada dibawah persentase modul

Y_{px} : rata-rata pengeluaran perkapita propinsi yang berada dibawah Z_{po} .

- jumlah penduduk miskin kabupaten/kota sementara adalah kumulatif penduduk yang pengeluarannya lebih kecil atau sama dengan Z_{ko} .



- lakukan penyesuaian GK kabupaten/kota dari kor dengan GK Propinsi modul.

$$Z_{km} = \frac{Y_{kx}}{Y_{px}} * Z_{pg}$$

Z_{pg} : GK propinsi gabungan rural+urban dari Susenas modul.

- Sesuaikan kembali jumlah penduduk miskin dengan formula :

$$Q_{km} = R_{kq} * Q_p$$

R_{kq} : rasio jumlah penduduk miskin masing-masing kab/kota dari kor terhadap jumlah penduduk miskin propinsi dari kor.

Q_p : jumlah penduduk miskin propinsi urban+rural dari modul

- Z_{km} dan Q_{km} adalah GK dan jumlah penduduk miskin kab/kota final.

2.1.3 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan (P_1 dan P_2)

Analisis kemiskinan absolut tidak cukup hanya memfokuskan pada kajian tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Ukuran-ukuran lain, seperti tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index, P_1*) dan tingkat keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index, P_2*), juga penting untuk dilihat dalam analisis kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak/kedalaman antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari garis kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga ukuran ini tidak mampu mengukur keparahan dari insiden kemiskinan. Ukuran yang sensitif terhadap



perubahan distribusi pendapatan/ pengeluaran di antara penduduk miskin adalah indeks keparahan kemiskinan.

2.2 Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi secara umum terhadap daerah lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan jasa yang menjadi paket komoditas.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode tahun tertentu. Berbeda pengertian indeks periodikal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar atau Indeks Harga Konsumen, kedua indeks tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tahun tertentu terhadap tahun dasar.

IKK merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU. IKK dihitung mengikuti konsep yang disesuaikan dengan proxy dan UU no.33/2005. IKK dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

2.2.1 Metode Penghitungan IKK

Pada tahun 2016 penghitungan IKK menggunakan 5 (lima) kelompok jenis bangunan. Pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/*comparable*.

Berikut, lima kelompok jenis bangunan yang digunakan dalam penghitungan IKK:



- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;
- c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- d. Bangunan untuk instalasi Listrik, gas, air minum dan komunikasi;
- e. Bangunan lainnya.

Berikut ini klasifikasi dari masing-masing jenis bangunan tersebut:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
2. Bangunan Pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi : pembangunan waduk, bendung, embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon, dan drainase, talang, check dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi : bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
3. Bangunan Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga,/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
4. Bangunan untuk Instalasi Listrik, gas, air minum dan komunikasi
 - a. bangunan elektrikal, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral



- telepon/telegraf, menara pemancar/penerima radar, microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
- e. Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik, tegangan lemah dan kuat.
 - f. Instalasi air, meliputi : instalasi air bersih, dan limbah dan saluran drainase pada gedung.
 - g. Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
 - h. Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, jalan kereta api dan instalasi listrik lapangan udara.
 - l. Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
5. Bangunan lainnya, meliputi : bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, bangunan sarana pertanian dan sarana lingkungan pemukiman.

2.2.2 Paket Komoditas

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2016 terdiri dari 18 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, sirtu, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat excavator, bulldozer, three wheel roller (mesin gilas), dan dump truck.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut comparable atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.2.3 Diagram Timbang

Diagram timbang yang diperlukan untuk menyusun IKK adalah



diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi (TKK). Sedangkan diagram timbang umum digunakan untuk menghitung indeks kemahalan konstruksi (IKK) umum.

2.2.3.1 Diagram Timbang Kelompok Jenis Bangunan

Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi termasuk sewa alat yang dibutuhkan atau digunakan untuk membangun 1 (satu) unit jenis bangunan. Jenis bangunan yang dimaksud terdiri dari 5 (lima) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- i) Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- ii) Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;
- iii) Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- iv) Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi;
- v) Bangunan lainnya.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data table Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum. Data diagram timbang kelompok jenis bangunan ini, dari tahun ke tahun selalu di *up-date* berdasarkan perkembangan data penunjang.

Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakanpun sama untuk seluruh kabupaten/kota.

2.2.3.2 Diagram Timbang Umum

Diagram timbang umum disusun berdasarkan data realisasi APBD masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, lapangan olah raga. Nilai pengeluaran tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan kelompok jenis bangunannya, lalu dibuat

perkiraan persentase total pengeluaran masing-masing kelompok jenis bangunan tersebut terhadap total seluruh pengeluaran.

2.2.4 Formula Penghitungan IKK

Seperti halnya diagram timbang kelompok jenis bangunan, IKK Kabupaten/Kota dan IKK Provinsi juga dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Pada Tahun 2010 terjadi perubahan tahun dasar, dimana sebelumnya kita menggunakan Tahun 2005 sebagai tahun dasar, di Tahun 2010 kita menggunakan Tahun 2010 sebagai tahun dasar. Oleh karena itu IKK rata-rata nasional di Tahun 2010 adalah = 100.

2.2.4.1 Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKK_{kj})

$$TKK_{kj} = \sum_{i=1}^{21} H_i Q_{ij}$$

- I : jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat
- TKK_{kj} : tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi kabupaten/kota k kelompok jenis bangunan j
- j : kelompok jenis bangunan ($j=1,2,3$)
- k : kabupaten/kota
- H_i : harga jenis barang/bahan bangunan i
- Q_{ij} : kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan j = diagram timbang kelompok jenis bangunan

2.2.4.2 Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional (TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^{434} TKK_{kj}}{491}$$



- TKK_{nj} : tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi kabupaten/kota k kelompok jenis bangunan j
 j : kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)
 k : kabupaten/kota
 n : Jumlah kabupaten/kota di Indonesia

2.2.4.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKK_{kj})

$$IKK_{kj} = \frac{TKK_{kj}}{Tkk_{nj}} \times 100$$

- IKK_{kj} : indeks kemahalan harga bangunan dan konstruksi kabupaten/kota k kelompok jenis bangunan j
 TKK_{nj} : tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi kabupaten/kota k kelompok jenis bangunan j
 j : kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)
 k : kabupaten/kota
 n : Jumlah kabupaten/kota di Indonesia

2.2.4.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKK_{uk})

$$IKK_{uk} = \overset{\circ}{\underset{j=1}{\mathop{\text{a}}{3}}} IKK_{kj} \cdot Q_j \cdot xI$$

- Q_j : diagram timbang IKK umum kabupaten/kota
 IKK_{kj} : indeks kemahalan harga bangunan dan konstruksi kabupaten/kota k kelompok jenis bangunan j
 IKK_{uk} : Indeks kemahalan harga bangunan/konstruksi umum kabupaten/kota k
 j : kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)
 k : kabupaten/kota

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB III TINGKAT KEMISKINAN



BAB III

TINGKAT KEMISKINAN

3.1 Jumlah Penduduk

Sasaran pembangunan yang akan datang harus lebih ditujukan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga kita tidak hanya mempunyai kuantitas penduduk yang besar akan tetapi juga akan mempunyai kualitas penduduk yang baik. Dengan SDM yang berkualitas maka Indonesia akan menjadi negara yang mempunyai daya saing dengan negara lain di dunia.

Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebesar 212.084 jiwa, meningkat menjadi 213.670 jiwa pada tahun 2015, dan di tahun 2016 menjadi 215.316 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar dalam 11 (sebelas) daerah kecamatan. Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kuala Jambi yaitu mencapai 120,37 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Sadu yaitu sekitar 6,71 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk merupakan indikator yang dapat digunakan dalam melihat persebaran penduduk.



**Tabel 3.1. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Timur
Tahun 2016**

Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]
Mendahara	911,15	26.160	28,71
Mendahara Ulu	381,3	17.434	45,72
Geragai	285,35	22.698	79,54
Dendang	478,17	15.021	31,41
Muara Sabak Barat	251,75	31.293	124,30
Muara Sabak Timur	410,28	17.186	41,89
Kuala Jambi	120,52	14.507	120,37
Rantau Rasau	356,12	23.347	65,56
Berbak	194,46	9.897	50,89
Nipah Panjang	234,7	25.556	108,89
Sadu	1821,2	12.217	6,71
Jumlah	5.445	215.316	39,54

Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur



Persebaran penduduk pada hakekatnya merupakan komposisi penduduk berdasarkan geografis. Dengan data persebaran penduduk, dapat dilihat apakah komposisi tersebut merata atau tidak dan juga dapat dilihat di mana saja terjadi pemusatan penduduk (*population density*).

3.2 Tingkat Kemiskinan

Strategi pembangunan jitu yang mengedepankan kesejahteraan rakyat diharapkan mampu mengangkat tingkat sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan lama yang dipercaya sudah seusia peradaban manusia. Penanganan serta pengentasan kemiskinan dirasakan sangat krusial untuk dilakukan mengingat negara kita yang sudah lama merdeka serta kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan.

Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 mencapai 12,76 persen, angka ini dapat diartikan bahwa sekitar 12,76 persen penduduk Tanjung Jabung Timur masih berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 mencapai 322.389 rupiah perkapita perbulan.

3.3 Perkembangan Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di suatu daerah menggambarkan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka menandakan semakin buruknya keadaan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi apabila angka kemiskinan semakin rendah maka semakin membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 2012-2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan Tanjung Jabung Timur mencapai angka 12,50 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi 13,42 persen. Pada tahun 2014 tingkat kemiskinan kembali



meningkat menjadi 13,55 persen dan pada tahun 2015 mencapai 14,17 persen. Kenaikan ini dikarenakan kenaikan inflasi yang berakibat pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12,76 persen. Penurunan ini menandakan bahwa telah terjadi perbaikan taraf hidup masyarakat Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilakukan dalam rangka menyejahterakan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif.

Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun ke tahun menunjukkan pergerakan yang cenderung mengalami kenaikan, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kenaikan ini bukan hanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi secara agregat di provinsi Jambi juga mengalami kenaikan dan beberapa kabupaten juga mengalami kenaikan.



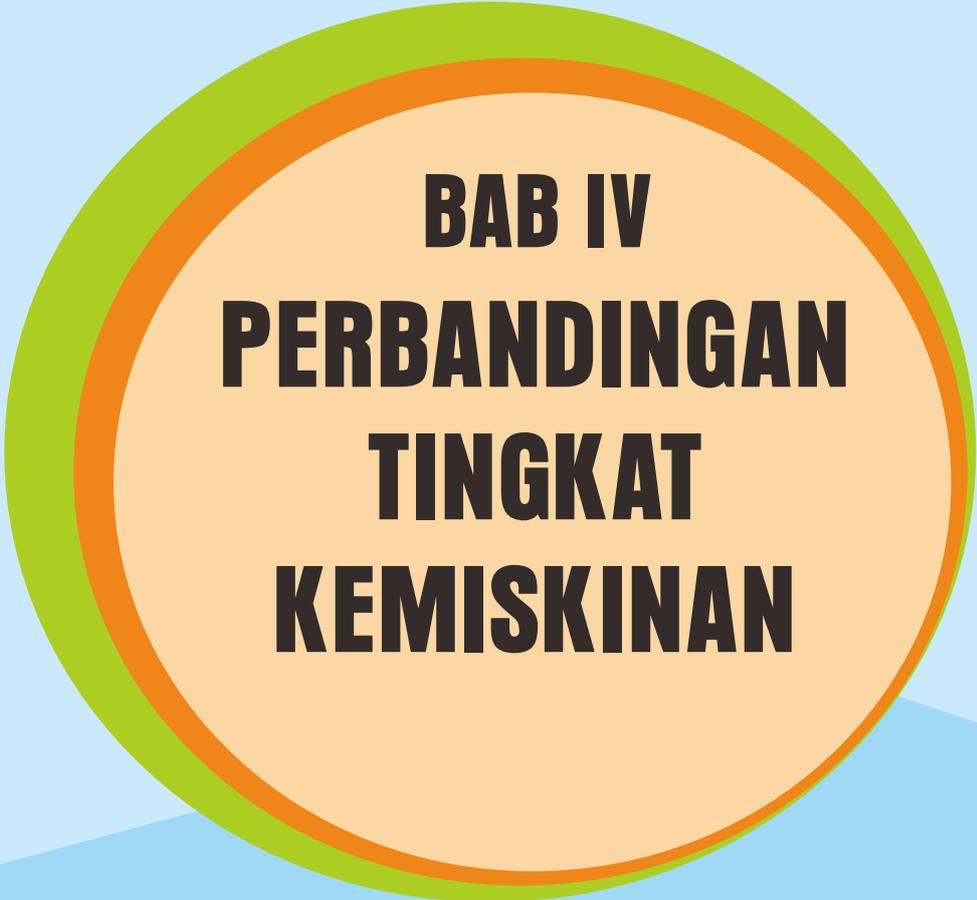
3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode tahun 2012-2016 terus mengalami kenaikan. Dalam kurun lima tahun tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,34 yaitu dari 1,66 pada tahun 2012 menjadi 2,00 pada tahun 2016.

Kenaikan angka P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Hal ini menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin jauh. Hal ini juga dapat diartikan bahwa rata-rata jarak taraf hidup penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin melebar.

Tidak berbeda dengan P1, Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2012 angkanya adalah 0,36 dan naik menjadi 0,56 di tahun 2016. Naiknya angka P2 ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 lebih parah dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan di antara penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 lebih buruk dibandingkan pada tahun 2012.

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB IV PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN



BAB IV PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

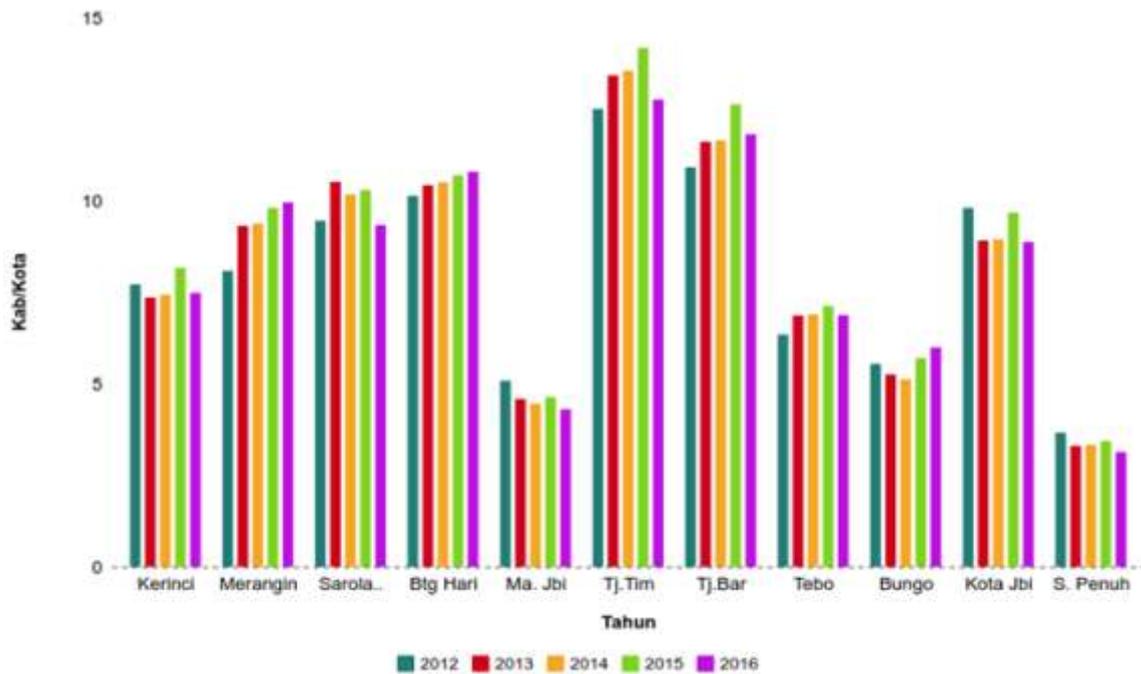
4.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2016 angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang tertinggi se Provinsi Jambi yaitu sekitar 12,76 persen, disusul dengan kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 11,81 persen. Sedangkan angka kemiskinan yang terendah adalah Kota Sungai Penuh yaitu sekitar 3,13 persen. Keadaan ini masih sama seperti tahun 2015 sebelumnya.

Angka kemiskinan Provinsi Jambi secara umum sekitar 8,41persen, angka ini bisa dikatakan jauh di bawah angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung timur.Hal ini menandakan bahwa taraf hidup penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan taraf hidup penduduk Provinsi Jambi secara umum.



Gambar 4.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi, Tahun 2012-2016

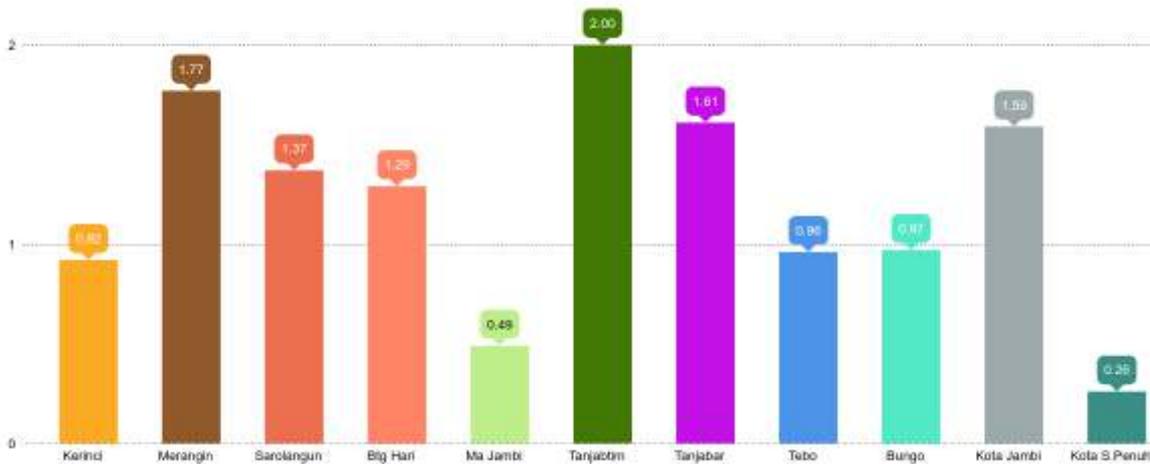


Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

4.2 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Pada Tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi untuk peringkat tertinggi diduduki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 2,00, kemudian diikuti Kabupaten Merangin di peringkat kedua dengan angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,77. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016



Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

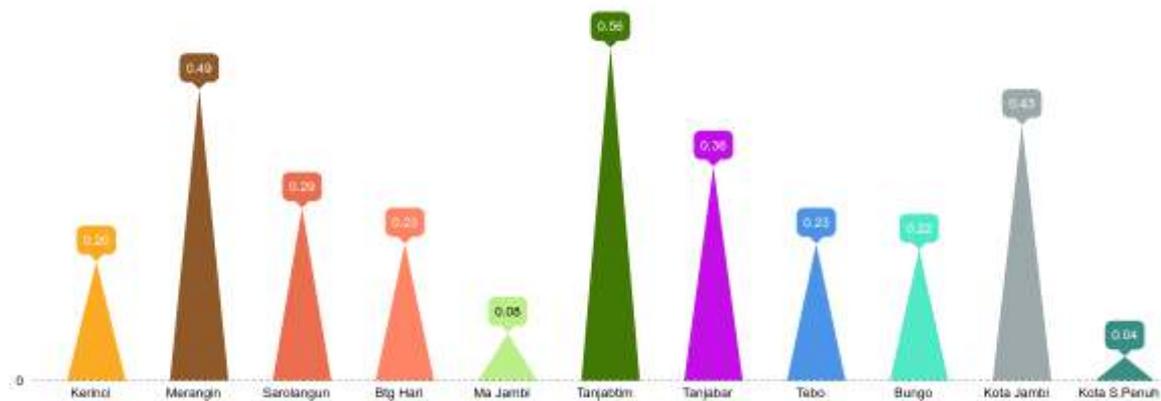
Angka P1 tertinggi ketiga terjadi di Tanjung Jabung Barat dimana angkanya mencapai 1,61, kemudian diikuti oleh Kota Jambi yaitu sebesar 1,59. Angka P1 terendah terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu mencapai angka 0,26. Bila dibandingkan dengan Kota Sungai Penuh, angka P1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat berbeda jauh, perbedaannya mencapai 1,74 poin.

Dari hasil perbandingan angka Indeks Kedalaman Kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi, didapatkan bahwa ketimpangan jarak taraf hidup antar penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jambi.



4.3 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Gambar 4.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016



Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

Tingginya angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menduduki peringkat tertinggi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota tersebut. Ini juga berarti bahwa kondisi penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup memprihatinkan dibandingkan dengan kondisi penduduk miskin yang ada di Kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB V INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI



BAB V INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

5.1 Perbandingan IKK

Pada Tahun 2016, daerah yang menjadi standar IKK nasional adalah Kota Surabaya dengan angka IKK 100. Bila dibandingkan angka IKK Kota Surabaya, IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih lebih baik. IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2015 mencapai angka 99,57.

Tabel 5.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	IKK 2016
[1]	[2]	[3]
1	Kerinci	87,64
2	Merangin	95,31
3	Sarolangun	96,70
4	Batang Hari	88,84
5	Muaro Jambi	89,64
6	Tanjung Jabung Timur	98,60
7	Tanjung Jabung Barat	98,06
8	Tebo	93,89
9	Bungo	92,72
10	Kota Jambi	90,96
11	Kota Sungai Penuh	86,35
Provinsi Jambi		97,99

Sumber: BPS Provinsi Jambi



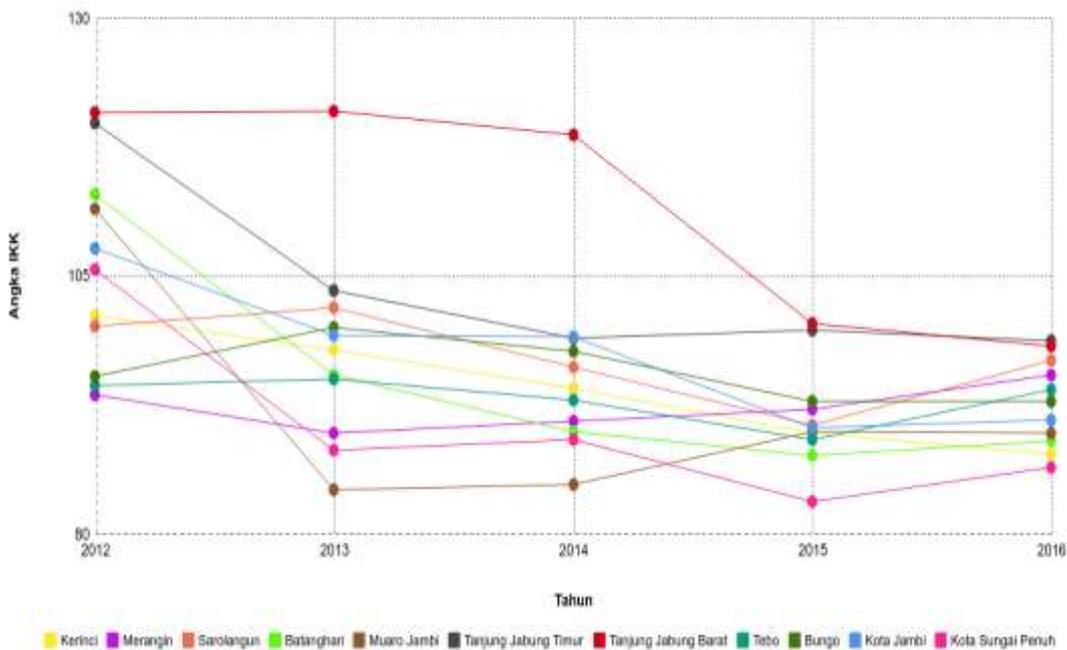
Tingkat kemahalan konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jambi menempati urutan pertama. Tingginya IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibandingkan kabupaten-kabupaten tersebut disebabkan karena wilayah Tanjung Jabung Timur sebagian besar berada pada daerah aliran sungai dan pesisir laut sehingga mayoritas masih mengandalkan transportasi air, dimana biaya menggunakan transportasi air akan lebih mahal bila dibandingkan dengan transportasi darat.

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi secara umum di Provinsi Jambi yaitu 97,99. Apabila dibandingkan dengan indeks kemahalan konstruksi rata-rata Provinsi Jambi, indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Tanjung Jabung Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemahalan konstruksi di Provinsi Jambi secara umum, atau dengan kata lain biaya mendirikan sebuah bangunan/konstruksi di Tanjung Jabung Timur akan lebih tinggi dibanding dengan biaya mendirikan bangunan di Provinsi Jambi secara umum.

5.2 Perkembangan IKK

Dalam periode tahun 2012-2016, peringkat IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perubahan yang berfluktuasi. Peringkat IKK suatu daerah dapat menunjukkan perkembangan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi di daerah tersebut. IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 sampai tahun 2013 menduduki peringkat kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Di Tahun 2014, IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menempati peringkat ketiga di Provinsi Jambi, di bawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi. Namun pada tahun 2015 IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menduduki peringkat kedua dan pada tahun 2016 peringkat IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi yang tertinggi di Provinsi Jambi.

Gambar 5.1 Perkembangan Peringkat IKK Menurut Kabupaten/Kota di BPS Provinsi Jambi, Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada Tahun 2012, peringkat IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di peringkat ke-2, dibawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2012 struktur ongkos untuk mendirikan bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Jambi. Kondisi ini juga terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2015, namun pada tahun 2014, struktur ongkos mendirikan bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi. Pada tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang memiliki struktur ongkos mendirikan bangunan tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tingginya biaya mendirikan bangunan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan penduduk untuk membuat rumah. Semakin tinggi biaya mendirikan bangunan di suatu daerah, maka akan mempengaruhi perbaikan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi



BAB VI KESIMPULAN



BAB VI KESIMPULAN

Dari ulasan-ulasan yang disajikan dalam publikasi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012 – 2015) angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan, tetapi tidak signifikan. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan.
2. Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016, apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Tahun 2015 maka terjadi penurunan sebesar 1,41 persen.
3. Biaya mendirikan bangunan di Tanjung Jabung Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi, ini terlihat dari angka IKK Tanjung Jabung Timur yang menduduki peringkat pertama.